



Program Pembangunan Kampung: Perspektif Fungsional dan Konflik dalam Konstruksi Sosial Masyarakat Suku Arfak di Kabupaten Manokwari

Triman Tapi¹, Yohanis Yan Makabori^{2*}

¹Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, Papua Barat

²Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, Papua Barat

ARTIKEL INFO

Sejarah artikel
Diterima 29/08/2021
Diterima dalam bentuk revisi 19/12/2021
Diterima dan disetujui 24/12/2021
Tersedia online 31/12/2021

Kata kunci
Perspektif
Konflik
Fungsional
Program Pembangunan Kampung
Konstruksi Sosial

ABSTRAK

Perbandingan perspektif jadi alibi terhambatnya proses pembangunan. Pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten sudah berupaya mempraktikkan beberapa program pembangunan. Pemerintah cenderung dominan pada nasionalisme dalam modernisasi, memandang Papua sebagai objek, yang kontras dengan budaya lokal masyarakat. Oleh sebab itu, musyawarah politik mengambil keputusan buat menuntaskan perspektif tersebut dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 mengenai kebijakan otonomi khusus yang berdampak dependensi adat sebagai motor penggerak roda pembangunan di Papua. Teori utama berasal dari perspektif fungsionalisme dan perspektif konflik (Mooney et al. 2007). Makalah ini membahas perspektif konstruksi sosial masyarakat suku Arfak di tiga kampung yaitu Sairo, Hangouw dan Indesey. Metode deskriptif dengan sampel purposif digunakan untuk menjelaskan fenomena berdasarkan data dari responden. Pengumpulan informasi menggunakan kuesioner, diskusi terfokus, observasi, serta wawancara. Secara fungsional, implementasi program pembangunan dilakukan berdasarkan alur perencanaan pembangunan yang disetujui oleh penguasa wilayah serta penguasa lokal dengan diketahui oleh pemerintah provinsi dan pusat selaku pemberi tanggung jawab. Program-program yang diprioritaskan antara lain pembangunan infrastruktur dasar kampung, perumahan, sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) serta air bersih. Ranah konstruksi sosial yaitu *Aske siros* (kemajuan), *Oru Eimofoj* (menunggu bantuan), *Monuh, Ofojingki/Mendes Efes, Ororoisa*. Perspektif konflik mengungkapkan terdapat pembatasan kuota partisipasi serta sosialisasi program kepada masyarakat, serta ketidakbukaan mengenai anggaran program. Selanjutnya, konsep *Aske Siros* tidak berjalan sesuai makna sebenarnya. Konsep tersebut didominasi oleh penguasa lokal, sementara kepada masyarakat lainya yaitu *Oru Eimofoj*. Secara fungsional, program pembangunan yang diimplementasikan menguntungkan sebagian oknum tertentu dan menimbulkan ketidakmerataan serta friksi dalam perihal menikmati dan memanfaatkan anggaran maupun program pemerintah.

© 2021 Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari

*Email Penulis Korespondensi : yanmkw@gmail.com

¹3manstppmkw17@gmail.com, ²yanmkw@gmail.com

ABSTRACT

Different perspectives become an obstacle to the development process. Central, Province, and local governments try to apply for several programs. The government prefers nationalism in modernization that views Papua as an object and, it is in contrast with local culture. Thus, political deliberation decided to solve it using regulation number 21, 2001 about special autonomy that becomes a high dependency from local. The preferred theory is functional and conflict perspectives (Mooney et al., 2007). This paper discusses the perspective of the social construction of the Arfak tribal community in three villages, namely Sairo, Hangouw, and Indesey.

This paper aimed to discuss Local's (Suku Arfak) view as a resident in Sairo, Hangouw, and Indesey. Descriptive method point to purposive sample help to describe data result. Data collected applied questioner, Focus Group Discussion (FGD),

observation, and interview. In functional, the result was the applying of program development was due on the planning flow chart. It was dealt with the local government and elite local and known by the central and provincial governments as their responsibility. Primary programs were infrastructure, house, school, healthy center, MCK, and cleaning water. Social construction concepts were Aske siros (progress), OruEimofoj (waiting for help) Monuh, Ofojingki/Mendes Efes, Ororoisa. In conflict, the limited participation and explanation about program and fund to the local. Subsequently, Aske Siros did not run based on its meaning. It was dominated by elite locals while the locals referred to Oru Eimofoj. Thus, functionally, program Implementing was only favorable to several figures. Then, unbalance situation was a conflict in enjoying and using the program government.

PENDAHULUAN

Sosiologi mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat (*community society*) dalam berbagai aspeknya. Oleh karena itu terdapat beberapa perspektif dalam memandang suatu masyarakat. Suatu masyarakat dipandang oleh perspektif tersebut dari sudut pandang yang berbeda, mengajukan pertanyaan yang berbeda dan mencapai kesimpulan yang berbeda (Murdiyanto, 2020). Perubahan dalam masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses yang terus menerus artinya setiap masyarakat pada kenyataannya akan mengalami perubahan, akan tetapi perubahan antara kelompok dengan kelompok lain tidak selalu sama (kompleks) serta banyak faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soekanto dalam Hatu (2011), perubahan masyarakat tersebut dapat mengenai nilai sosial, norma, pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, kekuasaan, wewenang,

interaksi sosial dan lain sebagainya (Hatu, 2011).

Manusia bersama-sama menciptakan dan mempertahankan semua fenomena sosial melalui praktik sosial. Mereka melihat tiga proses mendasar yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi (Galbin, 2014). Eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi adalah dialektika yang berjalan simultan, yaitu proses menarik keluar (eksternalisasi) sehingga seakan hal itu berada di luar (objektif) dan kemudian terdapat proses penarikan ke dalam (internalisasi) sehingga sesuatu yang berada di luar tersebut seakan-akan berada dalam diri atau kenyataan subyektif. “kenyataan” dan “pengetahuan” yang lahir dari konstruksi sosial atas realitas sehari-hari dipengaruhi oleh individu berdasarkan kebiasaan (*habitus*) dan cadangan pengetahuannya (*stock of knowledge*) (Sulaiman, 2016). Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi

berdasarkan kehendaknya, serta memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya (Luzar & Monica, 2014).

Perspektif merupakan sudut pandang yang diperoleh untuk melihat atau mengukur objek. Perspektif sosial meninjau beberapa faktor yaitu usia, pendidikan, sosial ekonomi, sosial-budaya dan keberlanjutan. Perspektif juga merupakan kelompok pendapat tentang suatu hal dan membawa seseorang untuk melihat objek/benda dengan cara tertentu. Sosiologi perspektif mengacu pada konteks sosial yang dilakukan seseorang atau kelompok yang dipengaruhi orang lain dan memunculkan suatu tindakan (Wulansari, 2013).

Perspektif fungsional merupakan sebuah sistem yang kompleks, setiap bagian bekerjasama untuk meningkatkan solidaritas dan kestabilan. Perspektif ini menekankan bagaimana lembaga sosial bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Syawaludin, 2014). Menurut Mooney *et al.*, (2007), perspektif fungsional menekankan koneksi masyarakat dari dalam yang fokusnya bagaimana tiap bagian mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bagian lainnya (Rahman *et al.*, 2020).

Perspektif konflik menjelaskan beragam aspek yang dimiliki dunia dengan memandang kelompok-kelompok penguasa dan keuntungan dari struktur sosial tertentu (Mooney *et al.*, 2007). Perspektif konflik adalah perspektif pertentangan kepentingan. Setiap kelompok memiliki perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan muncul karena setiap individu memiliki pandangan subjektif terhadap dunia.

Disamping itu, ikatan relasi antar individu akan saling mempengaruhi atau setidaknya mempunyai efek pengaruh terhadap individu lain. Adanya efek pengaruh tersebut merupakan potensi konflik interpersonal. Kedua perspektif ini adalah perspektif makro yang mana melihat makna sosial secara luas

Pembangunan disadari sebagai kondisi sosial ketika orang memperoleh kebutuhan mereka dalam sumber daya alam, rasional, dan mempertahankan sumber daya (Reyes, 2001). Definisi yang terkait adalah untuk meningkatkan kualitas semua bidang kehidupan manusia. Hal ini mencakup standar hidup setiap orang (pendapatan, tingkat konsumsi makanan, pakaian, perumahan, layanan kesehatan, pendidikan). Dalam kasus Papua, program pembangunan telah menghubungkan berbagai macam latar belakang orang Papua dengan dunianya. Proses ini menjadi penting untuk melihat pergerakan orang Papua dalam dinamika pembangunan yang mentautkan identitas dirinya dengan dunia global. Memahami imajinasi orang Papua tentang diri dan lingkungannya memerlukan pemahaman tentang detail keterhubungan dan siasat mereka dalam merespon pembangunan dalam bentuk berbagai macam program dan tawaran “pemberdayaan” yang dilakukan oleh negara (Suryawan, 2015).

Disamping itu, permasalahan yang terjadi yaitu adanya ketergantungan masyarakat terhadap musyawarah politik pemerintah semenjak adanya peraturan No. 21 tahun 2001 mengenai otonomi khusus (Silo, 2006). Pemerintah mengalokasikan 2% dari dana alokasi umum nasional setiap tahun. Dana ini

sekitar 3,8 triliun ke Provinsi Papua dan Papua Barat (Reumi *et al.*, 2015). Selanjutnya, 1,4 triliun dan 4 triliun dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan kampung. Menurut Ruhyanto (2016), Undang-undang Otonomi Khusus adalah kerangka kerja utama pendekatan kemakmuran untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Papua (Ruhyanto, 2016). Lewat alokasi anggaran yang ada diharapkan akan memperbaiki situasi terutama yang terkait dengan kemiskinan dan keterbelakangan, pelanggaran HAM, dan kinerja tata pemerintahan, seperti Pemekaran Wilayah, Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri (PNPM-Mandiri) dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Fanggidae *et al.*, 2016).

Manokwari merupakan kabupaten yang secara administratif terdiri dari 9 Distrik dan 164 kampung. Pada tahun 2017, jumlah masyarakat Kabupaten Manokwari mencapai 185.615 jiwa dengan luas wilayah 3.186,28 km² dan sebaran masyarakatnya sebanyak 58 jiwa/km². Suku-suku asli yang mendiami Kabupaten Manokwari adalah suku Arfak, Doreri, Irrir, Karoon, Kebar, dan Mpur/Amberbaken, dengan mayoritas tersebar di daerah pegunungan dan pesisir. Suku Arfak adalah komunitas adat yang terdiri dari 4 (empat) sub-suku, yaitu Hatam, Meyakh, Sough, dan Moyle. Masyarakat asli Suku Arfak memiliki tingkat kehidupan yang masih relatif sederhana, umumnya mereka bermata

pencaharian sebagai petani peladang berpindah (berkebun), beternak tradisional, berburu dan meramu. Tiga Kampung yaitu Sairo (Distrik Manokwari Utara), Hanghouw (distrik Tanah Rubu), dan Indesey (Distrik Warmare) dapat dengan mudah diakses dari ibukota Kabupaten Manokwari. Kampung-kampung ini dihuni oleh masyarakat lokal Suku Arfak. Selain itu, akses dari ketiga kampung ke ibukota kabupaten sekitar ± 60 menit dengan menggunakan sepeda motor atau transportasi umum.

Hasil penelitian sebelumnya dengan menggunakan teori internalisasi, eksternalisasi dan objektivisasi (teori Berger dan Luckman) mengungkapkan konsep *Aske Siros* telah mendominasi konsep lainnya serta menunjukkan perkembangan pembangunan setelah 10 tahun terakhir yang mana masih dibawah rata - rata target yang diharapkan (Tapi *et al.*, 2021). Makalah ini bertujuan menyediakan informasi mengenai perspektif masyarakat suku Arfak secara fungsional dan konflik dalam fenomena konstruksi sosial masyarakat Suku Arfak dalam program pembangunan kampung. Perspektif yang berbeda antara masyarakat biasa, penguasa lokal, pemerintah daerah dan pusat dalam pembangunan termasuk penerapan anggaran otonomi khusus. Metode kualitatif diterapkan untuk menggambarkan perspektif masyarakat dengan menggunakan sample purposif mengacu pada hasil data observasi, wawancara, kuesioner, dan diskusi kelompok terarah (FGD).

METODE

Metode deskriptif dengan sampel purposif diaplikasikan kepada 3 kampung locus

penelitian. Teknik *snowball* membantu mengakses dan mengkategorikan sasaran. Sasaran ataupun target yang diseleksi merupakan mereka yang hidup berdiam lebih dari 3 tahun di kampung serta melibatkan diri dalam sebagian program pembangunan kampung. Partisipan terdiri dari pria serta wanita, merupakan masyarakat lokal Suku Arfak yang mendiami kampung Indesey, Hanghouw dan Sairo. Selain itu, untuk memperoleh informasi tambahan, turut diwawancarai kepala kampung, tokoh perempuan, tokoh masyarakat lokal (kepala klan, pemilik hak ulayat, pemimpin gereja), dan pejabat pemerintahan setempat. Dengan menggunakan kuesioner, diskusi kelompok terarah (FGD), pengamatan, dan wawancara.

Penentuan fokus penelitian dengan pertimbangan bahwa: (1) Lokasi penelitian merupakan wilayah pemukiman (kampung) masyarakat lokal asli Papua, dengan sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian utama petani tradisional dengan karakteristik ekonomi subsisten, sehingga rentan terhadap kemiskinan; (2) Kampung-kampung masyarakat lokal ini, mudah dijangkau dengan transportasi darat dari ibukota Kabupaten Manokwari (dengan kondisi jalan relatif sangat baik), sehingga terbuka terhadap perubahan dari luar; (3) Kampung-kampung ini, telah merasakan beberapa implementasi kebijakan program pengentasan kemiskinan seperti program IDT, BLT, PUAP, PNPM Mandiri pekampungan, program Pamsimas, Program Swasembada Pajale, dan sejak tahun 3 tahun terakhir (2016-2018) mendapat bantuan dana kampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

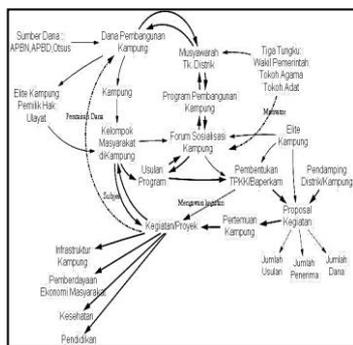
Kampung di Kabupaten Manokwari menerima sejumlah besar dana pembangunan di bawah mandat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Pengalokasian dana ini ke setiap kampung memperhitungkan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan tingkat kemiskinan (50%). Selama tiga tahun berturut-turut sejak bergulirnya dana desa, alokasi dana desa yang bersumber dari APBN untuk Kabupaten Manokwari terus mengalami kenaikan yakni dari 44 miliar (Tahun 2015) menjadi 100 miliar (Tahun 2016), dan 127 miliar di Tahun 2017. Dengan demikian, dari 164 kampung yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Manokwari akan menerima alokasi dana yang berkisar antara 600 juta hingga 800 juta per tahun dari program Distrik, provinsi, dan pemerintah pusat. Alokasi dana dari pemerintah pusat dan kabupaten telah direncanakan secara strategis untuk pengembangan otonomi khusus, yang rata-rata 1 miliar pada tahun 2017. Melalui alokasi anggaran yang diberikan pemerintah ini diharapkan akan dihasilkan program-program pembangunan berkelanjutan berupa program kegiatan: pengentasan kelaparan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan yang baik, peningkatan pendidikan bermutu, kesetaraan gender, peningkatan air bersih dan sanitasi, peningkatan energi bersih dan terjangkau, tersedianya lapangan kerja dan ekonomi yang layak, pemerataan sosial, peningkatan pemukiman dan pengentasan kelaparan (Numberi *et al.*, 2021).

Berdasarkan perspektif fungsional, program pembangunan di kampung telah

berjalan dengan baik, namun sebagian mengalami perspektif konflik. Dalam hal ini, beberapa hasil program difungsikan dengan baik sementara yang lain menjadi disfungsi. Secara fungsional, masyarakat memandang kehadiran program pembangunan di kampung sebagai kesempatan mendapatkan bantuan sementara yang mempengaruhi ekonomi, pekerjaan dan kebutuhan mereka. Secara disfungsi dalam hal ini ketersediaan fasilitas tidak digunakan. Disisi lain, masyarakat berkesimpulan program dan anggaran tidak bertahan lama untuk menunjang ekonomi dan kebutuhan mereka. Selanjutnya, terdapat konflik, karena keterbatasan masyarakat dalam partisipasi program yang mana dibatasi oleh *local power* sendiri. serta kurang adanya sosialisasi yang tepat terhadap masyarakat mengenai dana maupun tujuan program.

Perspektif Fungsional: Masyarakat terhadap Program Pembangunan Kampung

Program pembangunan di kampung terlaksana berdasarkan perencanaan kampung yang telah disetujui dan tersedia sumber anggarannya (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Alur Perencanaan Program Pembangunan Kampung pada Kampung masyarakat Lokal Asal Suku Arfak di Kabupaten Manokwari

Gambar 1 menyediakan alur perencanaan program yang berkelanjutan dilaksanakan

dengan menggunakan anggaran yang tersedia. Secara fungsional, setiap tahap distrukturkan secara detail agar dana yang tersedia mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di ketiga kampung tersebut. Beberapa program dapat terintegrasi dengan baik seperti pembangunan jalan, rumah layak huni, fasilitas air bersih. Program pembangunan desa/kampung lebih ditujukan pada hal yang bersifat publik dan digunakan oleh banyak orang, serta dengan pertimbangan memiliki dampak yang lebih luas (Arifin *et al.*, 2020).

Bentuk keterlibatan masyarakat berdasarkan penuturan pengalaman partisipan dapat dibagi menjadi tiga bentuk: keterlibatan dalam bentuk kehadiran, keterlibatan mengusulkan dan mengambil keputusan (proses perencanaan), dan keterlibatan sebagai pekerja saat pelaksanaan pembangunan sarana fisik. Keterlibatan warga masih sebatas menghadiri pertemuan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pertemuan lebih mirip dengan sosialisasi kegiatan yang akan dilaksanakan di kampung, karena usulan dan kegiatan sudah ditentukan oleh kepala kampung beserta aparat kampung. Tiga kampung telah menerima bantuan dalam bentuk air bersih. Itu diperoleh dari program PNPM Mandiri dan program nasional pasokan dan sanitasi air berbasis masyarakat (PAMSIMAS). Fasilitas lain adalah pusat kesehatan, sekolah dasar, dan gereja (99% populasi Papua dengan keyakinan Kristen). Namun berdasarkan observasi lapangan, kehadiran program pembangunan yang menghasilkan ketersediaan infrastruktur dasar terbangun di kampung, belum secara maksimal dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat.

Adanya disfungsi infrastruktur terbangun karena tingkat pendidikan yang rendah, dan kuatnya pengaruh elitee lokal.

Konstruksi Sosial Masyarakat dalam Impelementasi Program Pembangunan di Kampung

Terdapat empat ranah konstruksi sosial masyarakat suku Arfak yaitu *Monuh*, *Aske Siros*, *Ofojingki*, *Mendes efes*. *Monuh* artinya untuk membangun orang asli papua, pembangunan harus dimulai dari kampung dan program harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. *Aske Siros* artinya semua masyarakat ingin menikmati kemajuan (pemahaman dari aspek perubahan ekonomi). Program atau proyek pembangunan di kampung harus mendatangkan kemajuan. *Ofojingki* dan *Mendes efes* artinya keterbatasan dalam kepemilikan lahan berkebun dan ternak peliharaan (babi), tidak memiliki pengaruh dan kemampuan memutuskan, senantiasa mengharapkan adanya sesuatu yang datang membawa perubahan (*oru eimofoj*). *Ororoisa* artinya *mengalir ke bawah*, konteks pemahaman bahwa semua lapisan masyarakat di kampung berhak menikmati manfaat kehadiran program pembangunan.

Aske Siros juga bermakna memastikan standar hidup yang berkelanjutan. Dengan demikian, semua sumber daya yang dimiliki perlu dioptimalkan untuk proses perubahan. Konsep ini telah terinternalisasi sebagai pandangan hidup yang menegaskan bahwa setiap individu harus bekerja keras memperjuangkan perubahan dalam hidupnya, agar dihargai dan dihormati dalam komunitasnya. Sebagai subjek dan target

asaran dalam pembangunan di kampung, pandangan *Aske Siros* telah dieksternalisasi sebagai simbol. Ini menekankan dominasi elite lokal sebagai penguasa dan pemilik hak adat suatu wilayah, dengan prinsip untuk menikmati kemajuan secara eksklusif. Dalam konteks ini, mereka menjadi aktif, sementara mereka yang berada pada level struktur sosial terendah (kelompok masyarakat awam, non elitee lokal) memahami keberadaan program pembangunan sebagai *oru eimofoj*, yang berarti menunggu atau berharap sesuatu untuk membantu mereka menikmati kemajuan. Dalam konteks ini, mereka mengeksternalisasi nilai-nilai *Aske siros* dengan sikap pasif. Kondisi ini sekali lagi menekankan dominasi elite lokal dalam mengendalikan program pembangunan di kampung, sehingga tidak jarang pembangunan kampung hanya menjadi konstelasi ragam kepentingan dan menjadi minim partisipasi masyarakat. Bagi masyarakat adat Suku Arfak keberhasilan membangun di Tanah Papua khususnya di Kabupaten Manokwari sejatinya harus dimulai dari kampung (*Monuh/Minuh*).

Pandangan diatas cukup beralasan karena hampir sebagian besar orang asli Papua hidup atau bermukim di kampung. Mereka ini biasanya adalah komunitas yang sudah berada sejak awal berdirinya kampung sebagai bagian dari pewarisan hak atas tanah (Suryawan, 2018). Untuk itu Menurut Wamafma (2020) perlu adanya keberpihakan pada Orang Asli Papua, mulai pada proses pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan hasil bagi peningkatan kualitas hidup orang asli Papua (Wamafma, 2020). Namun, realitas pembangunan kampung yang telah berlangsung selama ini, belum

memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat Papua di kampung-kampung. Adanya penyimpangan dana program dan konstelasi berbagai kepentingan dalam pembangunan di kampung diduga sebagai faktor penyebabnya.

Perspektif Konflik: Masyarakat terhadap Program Pembangunan

Program yang berbeda bersifat parsial dan tidak terintegrasi secara holistic, serta atas nama program pemberdayaan kampung, dipertegas pula mencapai target realisasi anggaran membuat keterlibatan masyarakat dalam setiap program terjebak dalam proses mobilisasi bukan memunculkan kesadaran dari bawah. Program didominasi praktek “*top down*” bukan “*bottom-up*”, mobilisasi bukan partisipasi. Pelaksanaan pembangunan kampung, pada awal tahun 1990-an dengan pendekatan “makro sektoral dan mikro spasial” berskala regional, IDT dan PPK berskala nasional, hingga program Respek, PNPM Mandiri dan Dana Kampung, melibatkan partisipasi semua warga memperoleh kesempatan kerja yang sama dan mendapatkan upah kerja. Konsekuensinya menurut sekretaris Kampung Hanghouw, warga saat ini tidak mau bekerja secara sukarela. Objektivikasi masyarakat terhadap program pemerintah bahwa setiap program memiliki uang.

Selanjutnya, masyarakat lokal mengkonstruksi setiap program pembangunan kampung sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Secara subyektif, mereka sepakat bahwa mereka mendapat manfaat dari berbagai program yang ada seperti tampak pada proyek

infrastruktur. Namun, masyarakat tidak sepenuhnya puas dengan cara proyek diimplementasikan, karena mereka membutuhkannya untuk menjadi lebih partisipatif dan inklusif dengan melibatkan masyarakat umum pada setiap tahapan proses. Khususnya proses perencanaan sehingga dapat memberikan pendapat, terutama terkait prioritas sub-proyek yang dipilih untuk kampung mereka. Selain itu, temuan dilapangan mengungkapkan keinginan mereka untuk memperoleh akses yang sama dan berkeadilan dalam hal keterbukaan mendapatkan informasi tentang program, nama program, tim pelaksana program, besaran dana yang diterima, dan investasi program.

Dalam hal ekonomi, masyarakat juga kekurangan beberapa kebutuhan. Artinya ada bagian sistem dari alur perencanaan yang tidak terealisasikan dengan baik. Mereka menyebutkan bahwa mereka kekurangan pekerjaan permanen, modal wirausaha (usaha mikro), bantuan pertanian (alat dan pelatihan keterampilan) dan pendampingan, pasar serta fasilitas pinjaman. Selama FGD, semua peserta menyuarakan kondisi ini sebagai kekurangan yang harus dicari jalan keluarnya. Namun, mereka berulang kali menyebutkan bahwa semua ini tergantung pada pemerintah kampung dalam mengelola anggaran kampung. Meskipun kemiskinan di kampung terkait dengan berbagai dimensi, konsep kemiskinan bagi masyarakat kampung terdiri dari tiga dimensi utama yaitu ekonomi, sosial (budaya) dan infrastruktur. Dimensi pertama meliputi sejumlah kecil lahan yang diolah, kurangnya pekerjaan permanen (lapangan kerja),

kurangnya pendapatan, kurangnya peralatan pertanian, dan kurangnya akses mendapat bantuan modal usaha. Yang kedua, dimensi sosial, terdiri dari kurangnya keterampilan, kurangnya perumahan layak huni, dan terbatasnya layanan kesehatan. Dimensi terakhir mencakup kurangnya ketersediaan air bersih dan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) bagi masyarakat. Selama penelitian lapangan semua partisipan berpendapat bahwa ini memang masalah lama yang telah mereka hadapi selama bertahun-tahun. Sejumlah besar kekurangan di atas, seperti yang ditemukan oleh penelitian ini, belum diperbaiki dan menurut mereka harus diberi prioritas tinggi.

Komunitas yang bergabung dalam implementasi program pembangunan kampung masih didominasi oleh pengaruh dari elite lokal. Sebagai pemilik hak adat, kepala kampung memainkan peran dalam mengendalikan kampung, dalam bentuk tanah dan memberikan manajemen pada penggunaannya. Selanjutnya, tanah adat yang diterapkan adalah pada banyak program investasi secara fisik. Dengan demikian, elite lokal adalah yang pertama menikmati manfaat dari program ini. Infrastruktur terbangun secara individual seperti sarana air bersih dan MCK. Rasa enggan menggunakan fasilitas umum secara bersama yang terletak dalam areal lahan/pekarangan rumah orang lain menjadi alasan tidak memanfaatkan fasilitas. Meskipun menyediakan sumur dan MCK bagi tiga hingga empat rumah tangga, dalam praktiknya, hanya pemilik tanah yang menerima manfaat. Sementara itu, dampak non-infrastruktur yang dirasakan oleh masyarakat adalah peluang kerja sementara,

terutama dalam infrastruktur yang tidak memerlukan tenaga kerja terampil, seperti konstruksi jalan atau parit drainase.

Pembangunan infrastruktur fisik di kampung melahirkan peluang kerja sementara. Bagi kebanyakan dari mereka, program pengembangan kampung memberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang dibayarkan. Namun, peluang kerja sementara hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur yang tidak memerlukan keterampilan teknis khusus. Jenis-jenis infrastruktur yang diusulkan setelah Tahun 2014 yaitu untuk menghilangkan peran masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, mereka membutuhkan keterampilan khusus, seperti dalam pembangunan rumah layak huni, balai kampung, dan fasilitas umum masyarakat lainnya di kampung. Mengingat selama ini, peluang kerja yang diberikan adalah untuk para pekerja dari luar kampung dan suku non-Papua.

Program Pembangunan Kampung: Perspektif masyarakat kebanyakan dan elite lokal

Ketika masyarakat terlibat dalam membuat proposal pada setiap pertemuan, maka tingkat partisipasi biasanya tinggi. Namun, aktor utama dari program adalah elite lokal yang akhirnya berkontribusi lebih dominan pada setiap tahapan proses perencanaan sampai implementasi program. Kondisi ini menyebabkan pengurangan ide eksplorasi masyarakat kebanyakan sasaran program dan dampak pergeseran pilihan kegiatan program yang terkesan lebih normatif secara teknis. Narasi alur program pembangunan di kampung dimulai dari penentuan rencana kegiatan di

tingkat cluster, yang merupakan kelompok kampung berdasarkan lokasi yang mana difasilitasi oleh kabupaten. Setelah keputusan disepakati, setiap kampung menindaklanjuti pertemuan perencanaan, yang merupakan permintaan persetujuan dari masyarakat sasaran untuk melaksanakan program yang disepakati di tingkat kabupaten atau cluster. Konstruksi ini terus dibangun dalam struktur jaringan komunitas kampung. Sebuah realitas dalam memandang kehadiran program pembangunan di kampung, cenderung memunculkan perspektif yang berbeda dari tiap kelompok masyarakat. Masyarakat awam (akar rumput) biasanya mengharapkan agar mereka lebih dilibatkan dan mendapat lebih banyak informasi tentang program (pandangan “*ororoisa*”), sedangkan elite lokal kampung memiliki harapan yang sebaliknya. Mereka menginginkan pembatasan keterlibatan masyarakat kebanyakan, dengan alasan akan mempercepat pelaksanaan program. Penentuan mereka yang menerima manfaat dikendalikan oleh lingkaran elite kampung. Sebagai misal, Kepala Kampung beserta Bamuskam tidak hanya menentukan usulan yang menjadi prioritas kegiatan, namun juga menentukan siapa saja yang menjadi penerima manfaat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perspektif fungsional masyarakat terhadap Program Pembangunan menghadirkan alur perencanaan Program Pembangunan berwujud implementasi program bantuan infrastruktur publik terbangun seperti prasarana air bersih, sanitasi lingkungan, rumah layak huni, jalan kampung, sarana pelayanan

kesehatan, tempat ibadah dan aktifitas kepemudaan. Namun, berdasarkan observasi lapangan, masih ada kecenderungan disfungsi beberapa fasilitas fisik terbangun. Sebagai contoh, tidak termanfaatkannya beberapa fasilitas MCK yang terbangun, kondisi prasarana dan sarana yang dibiarkan tidak terawat (seperti fasilitas penampung air bersih, MCK, bangunan pertemuan warga). Berjalannya alur perencanaan program tersebut sangat dipengaruhi oleh konsep konstruksi sosial yaitu *Aske siros* (kemajuan), *oru eimofoj* (menunggu atau berharap bantuan), *Monuh*, *Ofojingki*, *Mendes efes* dan *Ororoisa*. Secara fungsional, konsep-konsep ini sangat mempengaruhi keterlibatan masyarakat dan pemerataan dalam menikmati kesejahteraan. Bentuk keterlibatan dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu keterlibatan dalam bentuk kehadiran, keterlibatan mengusulkan dan mengambil keputusan dalam proses perencanaan, serta keterlibatan sebagai pekerja saat pelaksanaan pembangunan sarana fisik. Selanjutnya secara konflik keterlibatan masyarakat dalam program yaitu masyarakat tidak sepenuhnya memahami alur perencanaan program sehingga konsep konstruksi sosial menjadi tidak seimbang dimana *Aske siros* yang dimaknai kemajuan dan cenderung memastikan standar hidup, hanya dinikmati oleh penguasa lokal (elite lokal). Sementara untuk beberapa kalangan akan berada pada konsep lain seperti *oru eimofoj* (menunggu atau berharap bantuan). Hal tersebut telah mempengaruhi ketidakberjalannya program pembangunan sesuai target pemerintah provinsi yang mana bermaksud meningkatkan kualitas hidup

masyarakat. Dengan demikian, pendekatan kedaerahan yang digunakan dalam proses pembangunan haruslah diganti.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., ... Handoko, R. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79(January), 382–394.
- Eko Murdiyanto. (2020). *Sosiologi Perdesaan Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa (Edisi Revisi)* (Edisi Revi). Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Fanggidae, I. G., Fajri, H., & Yuanjaya, P. (2016). Menelisik Kinerja Governance di Daerah Otonomi Khusus Papua Barat. *NATAPRAJA*, 4(1), 91–106.
- Galbin, A. (2014). An Introduction to Social Constructionism. *Social Research Reports*, 26(November), 82–92.
- Hatu, R. (2011). Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan. *Inovasi*, 8(4), 1–11.
- Luzar, L. C., & Monica, M. (2014). Penerapan Cultural Studies dan Aliran Filsafat dalam Desain Komunikasi Visual. *Humaniora*, 5(2), 1295–1304.
- Mooney, L., Knox, D., & Schacht, C. (2007). The Three Main Sociological Perspectives. *Understanding Social Problems*, 1–2.
- Numberi, M. L., Sumule, A. I., & Tjolli, I. (2021). Aspek-Aspek Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan dan Pemanfaatan Dana Desa (Studi Kasus Kampung Wamesa dan Warkomi di Distrik Manokwari Selatan). *Kehutanan Papuasiasia*, 7(1), 26–40.
- Rahman, A., Zulkifli, & Juanda. (2020). Ruang Lingkup Inovasi Pendidikan Karakter Di Sekolah. *JPKN Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(2), 179–191.
- Reumi, F., Yunus, A., & Irwansyah. (2015). Recognition of the Customary Court: A Review of Decentralization in Papua as Special Autonomy. *Quest Journals Journal of Research in Humanities and Social Science*, 3(7), 57–69.
- Reyes Giovanni. (2001). Four Main Theories Of Development: Modernization, Dependency, World-System, And Globalization. *Revista Critica de Ciencias Sociales y Juridicas*, 04(1).
- Ruhyanto, A. (2016). The Perils of Prosperity Approach in Papua. *Peace Review*, 28(4), 490–498.
- Akbar, S. (2013). *Model Pemberdayaan Masyarakat Kampung Membangun Jayapura Baru*.
- Sulaiman, A. (2016). Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. *Society*, 4(1), 15–22. <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>
- Suryawan, I. N. (2015). Menafsirkan Papua (Lebih) Emansipatif dan Reflektif: Perspektif Antropologi. *ETNOHISTORI*, II(2), 98–115.
- Suryawan, I. N. (2018). Fragmen Ketersingkirkan di Pedalaman Teluk.
- Syawaludin, M. (2014). Memaknai Konflik Dalam Perspektif Sosiologi Melalui Pendekatan Konflik Fungsional. *Tamaddun*, 14(1), 1–18.
- Tapi, T., Kurnia, G., Setiawan, I., & Sumule, A. (2021). Village development program: The view of 'askesiros' in social construction, a development reality of Local Papuan Residents in Manokwari Regency.
- Wamafma, Y. (2020). Evaluasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Program Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung (Prospek) di Provinsi Papua. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(2), 48–59.
- Wulansari, D. (2013). *Sosiologi - Konsep dan Teori*.